BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Pengembangan Ekonomi Nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu UMKM. Selain itu UMKM menjadi tulang unggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan nya dalam upaya memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Peningkatan daya saing melalui pemberdayaan program untuk UMKM yang produktif dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) pemerintah memegang peranan terbesar dalam upayat ersebut. Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Serta Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung, tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 pada misi ke empat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Salah satu sasarannya yaitu mengembangkan produk-produk UMKM unggulan Kota Bandung melalui strategi pengembangan dan penguatan Sentra Industri Potensial Kota Bandung.

Maka berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung No.530/Kep.295-DisKUKM.PERINDAG/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang hingga kini belum

dirubah, Kota Bandung memiliki beberapa sentra industri dan perdagangan yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Sentra-sentra tersebut adalah:

1. Sentra Industri dan Perdagangan Sepatu Cibaduyut
2. Sentra Perdagangan Jeans Cihampelas
3. Sentra Industri Kaos Suci
4. Sentra Industri Rajut Binong Jati
5. Sentra Tekstil dan Produk Tekstil Cigondewah
6. Sentra Industri Tahu Tempe Cibuntu
7. Sentra Industri Boneka Sukamulya.

Ketujuh Sentra diatas adalah sentra-sentra potensial Kota Bandung yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Kota Bandung pada khususnya dan tingkat nasional pada umumnya. Kebijakan pemerintah Kota Bandung fokus terhadap perkembangan tujuh sentra tersebut. Dalam perjalanannya guna meningkatkan perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan sentra tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan, ini terjadi karena setiap sentra memiliki karakteristik kebutuhan dan penyelesaian masalah yang spesifik, juga penanganan terhadap permasalahan sentra tersebut membutuhkan kerja keras semua element (stakeholder) baik pemerintah, swasta, dan juga yang lebih penting masyarakat di kawasan Sentra.

Haji Ade yang merintis perkampungan boneka di Sukamulya ini dan buatannya hasil jahitan tangan. Pada 1990-an buatannya mulai diperkenalkan ke pasaran. Usaha kerajinan boneka Haji Ade ini mulai banyak dilirik masyarakat.

Orderan selalu ada setiap hari. Terutama pada hari perayaan seperti Natal, tahun baru, atau Vallentine. Orderan Haji Ade bisa dua kali lipat lebih banyak. Usaha H Ade semakin berkembang. Pesanan pun semakin banyak sehingga membutuhkan banyak karyawan untuk menyelesaikannya.

Warga setempat pun diajaknya untuk ikut membantu kegiatan produksi. Keberhasilan H Ade memberikan inspirasi pada masyarakat setempat. Satu per satu mereka pun tertarik untuk mengikuti jejaknya. Kini usaha Haji Ade diteruskan oleh sang menantu, Kiki Junaedi setelah Haji Ade wafat. Usahanya ini membuat tetangganya tertarik karena orderan selalu ada setiap saat. disaat usaha yang lain sedang merosot, usaha boneka buatan tangan ini justru makin banyak pesanan.

Wargapun ikut meramaikan usaha ini, jadilah kampung Sukamulya menjadi Sentra Boneka Sukamulya kain buatan tangan. Sejak tahun 2014 boneka matras menjadi salah satu favorit (boneka berbentuk persegi yang sekaligus bisa dijadikan alas duduk atau berbaring). Meski berukuran seperti matras, boneka ini tetap dilengkapi dengan karakter tertentu, seperti beruang atau panda, bisa juga karakter tokoh kartun tertentu. Selain itu pertambahan jumlah usaha Sentra Boneka Sukamulya tidak terlalu tinggi, tapi terus berjalan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi maka kampung yang awalnya belum menjadi sekarang sebagai kampung pengrajin boneka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan sampai saat ini menjadi Sentra Boneka Sukamulya adalah salah satu sentra yang sangat berpotensi terletak di Jl. Sukamulya Indah No.18 RT 01/02 Bandung.

Mayoritas masyarakat kampung Sukamulya menjadi pengrajin boneka, masyarakat di sana menjadikan rumah mereka menjadi tempat pembuatan boneka.

Fokus sentra ini adalah memproduksi berbagai jenis boneka, diantaranya seperti karakter tokoh kartun, binatang, emoticon dan bantal. di sana terdapat kurang lebih 17 perajin. Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 768.940 unit dengan nilai investasi Rp. 2,691 miliar dan menyerap tenaga pekerja sebanyak 212 Orang.

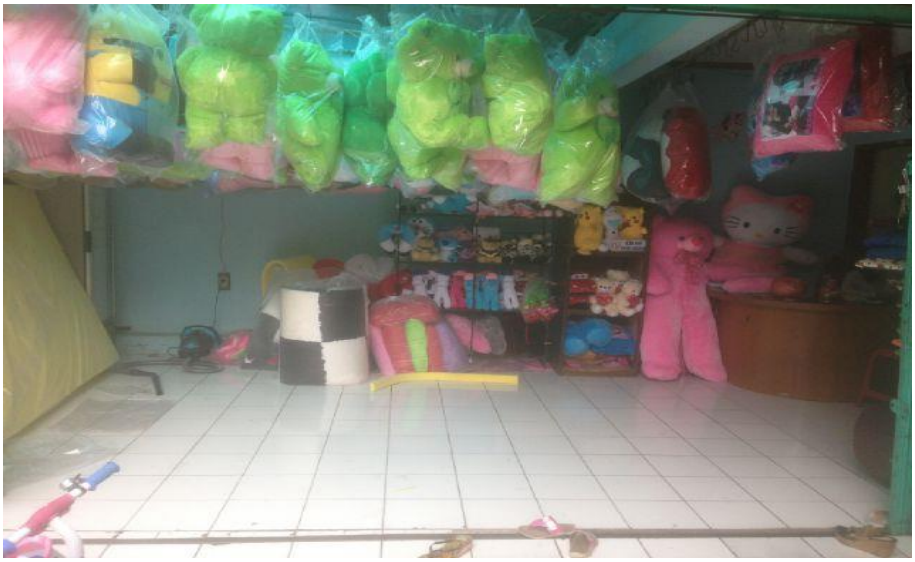
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Boneka sukamulya mulai ada sejak Tahun 1990-an. Sentra Industri Boneka Sukamulya adalah salah satu sentra yang sangat berpotensi terletak di Jl. Sukamulya Indah No.18 RT 01/02 Kota Bandung merupakan sentra potensial Kota Bandung. Haji Ade yang merintis perkampungan boneka di Sukamulya ini dan buatannya hasil jahitan tangan. Pada 1990-an buatannya mulai diperkenalkan ke pasaran. Usaha kerajinan boneka Haji Ade ini mulai banyak dilirik masyarakat. Orderan selalu ada setiap hari. Terutama pada hari perayaan seperti Natal, tahun baru, atau Vallentine. Orderan Haji Ade bisa dua kali lipat lebih banyak. Usaha H Ade semakin berkembang. Pesananpun semakin banyak sehingga membutuhkan banyak karyawan untuk menyelesaikannya. Warga setempat pun diajaknya untuk ikut membantu kegiatan produksi.

H.Ade memberikan inspirasi pada masyarakat setempat. Satu per satu mereka pun tertarik untuk mengikuti jejaknya. Kini usaha Haji Ade diteruskan oleh sang menantu, Kiki Junaedi setelah Haji Ade wafat. Usahanya ini membuat tetangganya tertarik karena orderan selalu ada setiap saat. Di saat usaha yang lain sedang merosot, usaha boneka buatan tangan ini justru makin banyak pesanan. Para warga pun ikut meramaikan usaha ini, jadilah kampung Sukamulya menjadi sentra industri boneka kain buatan tangan. Sejak tahun 2014 boneka matras menjadi salah

satu favorit (boneka berbentuk persegi yang sekaligus bisa dijadikan alas duduk atau berbaring). Meski berukuran seperti matras, boneka ini tetap dilengkapi dengan karakter tertentu, seperti beruang atau panda, bisa juga karakter tokoh kartun tertentu. Selain itu pertambahan jumlah usaha Sentra Boneka Sukamulya tidak terlalu tinggi, tapi terus berjalan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi maka kampung yang awalnya belum menjadi sekarang sebagai kampung pengrajin boneka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan sampai saat ini menjadi Sentra Boneka Sukamulya.

Gambar 4.1

(Sentra Boneka Sukamulya)



Sumber: UMKM Sentra Boneka Sukamulya 2017

Mayoritas masyarakat kampung Sukamulya menjadi pengrajin boneka, masyarakat di sana menjadikan rumah mereka menjadi tempat pembuatan boneka. Fokus sentra ini adalah memproduksi berbagai jenis boneka, diantaranya seperti karakter tokoh kartun, binatang, emoticon dan bantal. di sana terdapat kurang lebih

17 perajin. Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 768.940 unit dengan nilai investasi Rp. 2,691 miliar dan menyerap tenaga pekerja sebanyak 212 Orang.

4.1.1.2 Program Standar Nasional Indonesia (SNI)

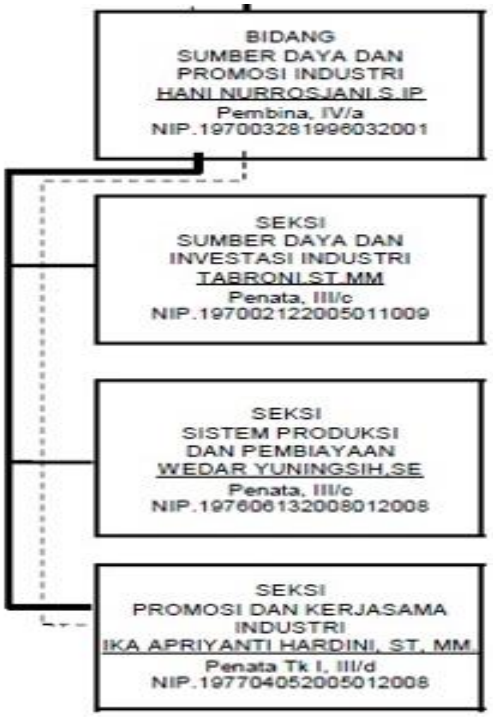
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak secara wajib pemberlakuan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib upaya pemerintah meningkatkan kualitas produksi bisa bersaing dengan luar negeri dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan biaya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus membayar lima juta setiap perenambulan dengan biaya perpanjangan yang sama dengan biaya persyaratan melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri dalam menghadapi persainga MEA

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Program Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri untuk mengikuti pembinaan penerapan pada untuk sentra UMKM seperti pengrajin Boneka Sukamulya untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pengrajin Boneka dibutuhkan komitmen dan motivasi yang kuat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pengrajin Boneka Sukamulya untuk meningkatkan kinerja sehingga produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diterima oleh pasar nasional maupun pasar *global.* Karena Boneka merupakan salah satu sasaran utama produksi *global.*

Tabel 4.1

(Struktur Organisasi Pelaksana Program SNI)



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2017

4.1.1.3 Standar Oprasional Prosedur Program SNI

Standar Oprasional prosedur Program Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki beberapa tata cara yaitu sebagai berikut :

1. Perenam(6)bulan sekali bayar Rp5000.000.00
2. Harus Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Usahanya Harus Jelas

4.1.1.4 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Tahun 2016 Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung dengan adanya SOTK mulai tahun 2017 dipisah menjadi dua Dinas koprasi dan usaha kecil mikro dan menengah kota bandung dan dinas perdagangan perindustrian kota bandung. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua Dinas yaitu Dinas Koperasi Kota Bandung dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Gambar 4.2

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2017

Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah Departemen Koperasi dan Departemen Perindustrian Perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota yang diberi nama kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai kosekuensi logis pemerintahan memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah Dinas Koprasi Kota Bandung dan Dinas perindustrian dan perdagangan yang semula merupakan di bawah instansi vertikal yaitu departement perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan di berlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintahan maka terjadi penggabungan antara koprasi kota bandung dan koprasi perindustrian perdagangan kota bandung No . 13 tahun 2007.

Rencana dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek epaluasi kinerja priode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional khususnya pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahwa bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk priode berikutnya. Dinas Koprasi dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintahan kota bandung.

Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus di aplikasikan dan diimplementasikan kedalam visi dan misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud kedalam peraturan daerah kota bandung nomor 02 tahun 2001 tentang kewenangan daerah kota bandung sebagai daerah otonomi. Adapun visi misi tersebut dijelaskan dibawah ini.

4.1.1.4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Seperti yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018 bahwa pemerintah Kota Bandung sudah menetapkan Visi Pembangunan yaitu : ***"Terwujudnya perdagangan dan perindustrian Kota Bandung yang berdaya saing tinggi guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta berbasis teknologi",*** Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

Pertama : Bandung, Meliputi wilayah dan seluruh isinya, Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Tahun 1811 hingga sekarang.

Kedua : Unggul, Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Ketiga : Nyaman, Terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Keempat : Sejahtera, Mengarahkan pembangunan Kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba

dan wakil tuhan dibumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal dan jasad.

Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi Kota lainnya.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan dimaksud, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Visi Pembangunan, yaitu : “Terwujudnya perdagangan dan perindustrian Kota Bandung yang berdaya saing tinggi guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta berbasis teknologi”

Adapun makna dari Visi tersebut adalah merupakan kemampuan untuk melihat perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan upaya untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan baik kapasitas maupun

kapabilitas seluruh potensi Perdagangan dan Perindustrian agar memiliki daya saing yang kuat dalam mengarungi persaingan pembangunan yang semakin ketat.

4.1.1.4.2 M i s i

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing perdagangan dalam dan luar negeri serta pelayanan kemetrologian yang berbasis teknologi;
2. Meningkatkan daya saing industri yang berbasis teknologi;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

4.1.1.4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Table 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Misi 1	:	Meningkatkan daya saing perdagangan dalam dan luar negeri serta pelayanan kemetrologian yang berbasis teknologi
Tujuan	:	1. Terwujudnya Perdagangan dalam dan luar negeri yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing; 2. Terwujudnya pelayanan prima metrologi legal.

Sasaran	:	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan dalam dan luar negeri yang berdaya saing; 2. Meningkatnya SDM Perdagangan; 3. Meningkatnya ekspor Kota Bandung; 4. Meningkatnya pelayanan metrologi legal.
Indikator Sasaran 1	:	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok
Indikator Sasaran 2	:	Cakupan pembinaan distribusi perdagangan
Indikator Sasaran 3	:	Nilai ekspor Kota Bandung
Indikator Sasaran 4	:	Tingkat kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri

Misi 2	:	Meningkatkan daya saing industri yang berbasis teknologi
Tujuan	:	Terwujudnya industri yang berdaya saing
Sasaran	:	1. Meningkatnya mutu produk industri; 2. Meningkatnya SDM Industri; 3. Meningkatnya inovasi teknologi industri; 4. Meningkatnya promosi industri.
Indikator Sasaran 1	:	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk

Indikator Sasaran 2	:	Jumlah lapangan pekerjaan baru
Indikator Sasaran 3	:	Persentase Industri Kecil yang memiliki SDM yang berkualitas

Misi 3	:	Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal
Tujuan	:	Terwujudnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal
Sasaran	:	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal
Indikator sasaran	:	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti - Nilai evaluasi AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2017

4.1.1.4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas pokok fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok**

   Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. **Fungsi**

   Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E-Commerce,* Perdagangan Regional dan Luar Negeri, Perencanaan dan Pengembangan Industri, Sumber Daya dan Promosi Industri

serta Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Legal dan Balai Industri dan Promosi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E-Commerce*, Perdagangan Regional dan Luar Negeri, Perencanaan dan Pengembangan Industri, Sumber Daya dan Promosi Industri serta Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Legal dan Balai Industri dan Promosi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E-Commerce*, Perdagangan Regional dan Luar Negeri, Perencanaan dan Pengembangan Industri, Sumber Daya dan Promosi Industri serta Unit Pelayanan Teknis Kemetrologian Legal dan Balai Industri dan Promosi
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

4.1.1.4.6 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahkan :
   a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
   b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
3. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, membawahkan :
   a. Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan;
   b. Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan; dan
   c. Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan.
4. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E Commerce*, membawahkan :
   a. Kepala Seksi Distribusi Perdagangan;
   b. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
   c. Kepala Seksi Pengembangan *E-Commerce*.
5. Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri, membawahkan:

a. Kepala Seksi Ekspor Impor;

b. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor; dan

c. Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.

6. Kepala Bidang Perencanaan dan PengembangaIndustri,membawahka:

a. Kepala Seksi Perencanaan Sentra Industri;

b. Kepala Seksi Pengembangan, Inovasi dan Teknologi; dan

c. Kepala Seksi Standarisasi Industri.

7. Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri, membawahkan :

a. Kepala Seksi Sumber Daya dan Investasi Industri;

b. Kepala Seksi Sistem Produksi dan Pembiayaan; dan

c. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Industri.

8. Kepala UPT Balai Industri dan Promosi, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

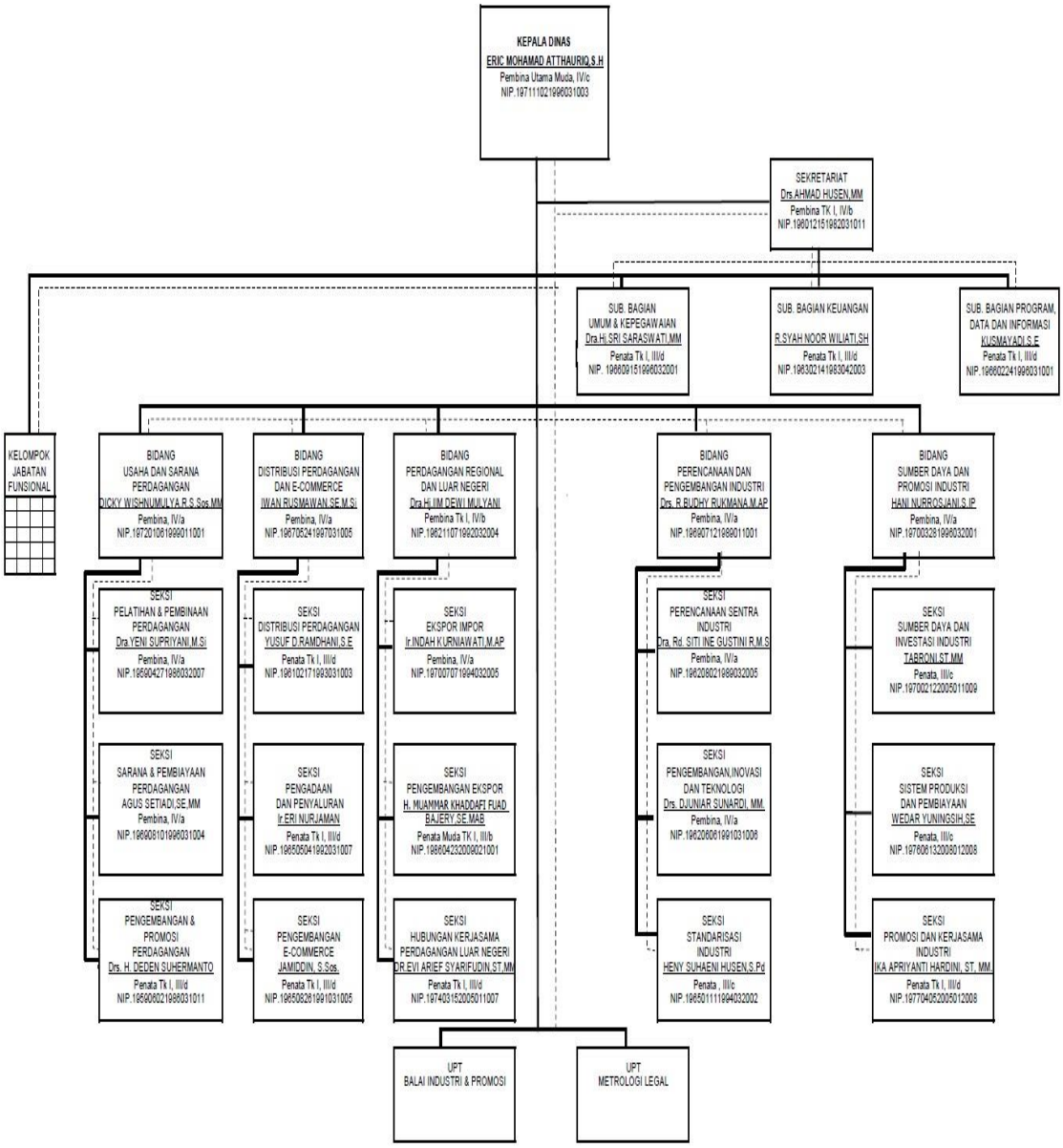
9. Kepala UPT Metrologi Legal, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2017

4.2 Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dalam berbagai kegiatan yang membuat masyarakat lemah menjadi berdaya sebagai sebuah tujuan perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya sehingga masyarakat mampu hidup mandiri dan sejahtera dan mampu bersaing. Masyarakat yang berdaya adalah yang mempunyai *inovatif* upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang unggul serta *inovatif* mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Kebutuhan itu baik berupa fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sering kali berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak yang berkepentingan kurang berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat teknis maupun non teknis sering muncul dilapangan.

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA). Pembahasan dilakukan sesuai pada rumusan masalah yang telah disusun yaitu bagaimana pemberdayaan program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Seperti yang diungkapkan oleh Suharto bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui Pendekatan 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan program pendampinga usaha Sentra Boneka Sukamulya oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, akan dilakukan analisis berdasarkan Pendekatan Pemberdayaan 5P.

4.2.1 Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya Melalui Pendekatan Pemungkinan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Pendekatan pemungkinan melalui pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif, dan strategis yang memungkinkan potensi Sentra Boneka Sukamulya berkembang lebih optimal.

Pemungkinan menjadi hal utama dalam meningkatkan potensi-potensi sentra Boneka Sukamulya dapat berkembang maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai penggerak untuk mencapai perubahan yang lebih baik harus mampu menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif, dan strategis melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya memungkinkan Senta Boneka berkembang.

Berdasarkan penelitian dilapangan, didapatkan sebuah data dan fakta bahwa dalam aspek pemungkinan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melaui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 tentang pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib pemberlakuan SNI wajib upaya pemerintah meningkatkan kualitas produksi bisa bersaing dengan luar negeri dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan biaya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus membayar lima juta setiap perenambulan dengan biaya perpanjangan yang sama dengan biaya persyaratan.

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri dalam menghadapi persainga Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) belum berhasil menciptakan sebuah suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi pengrajin Sentra Boneka Sukamulya berkembang lebih optimal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri sebagai penggerak Program Standar Nasional Indonesia (SNI) melakukan program kepada semua sentara Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi untuk mengikuti program dengan syarat yang ditetapkan internal Bidang

Sumber Daya dan Investasi Industri harus mempunyai SIUP dan Membayar lima juta perenambulan setelah itu akan diberikan lebel SNI kepada setiap Sentra Boneka Sukamulya tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan sosialisasi pentingnya mengikuti program tersebut tanpa adanya bantuan berupa modal yang di salurkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kepada pengrajin boneka yang berada di Sentra Boneka Sukamulya

Pemungkinan suasana iklim yang kondusif juga berdasarkan lokasi sentara Boneka Sukamulya yang tidak strategis memasuki gang dimana jarak jalan menuju Sentra boneka menempuh jarak 3km maka jauh dari akses transfortasi umum mengakibatkan lokasi Sentra Boneka Sukamulya kurang strategi selain itu pemerintah belum mampu menyesuaikan harga sesame Sentra Boneka maka terjadilah persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan banyak pengrajin yang bangkrut selain itu kurangnya dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memperluas pemasaran sehingga Sentra Boneka Sukamulya mencari pasar sendiri untuk mempromosikan produknya. Maka dari itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang menerapkan program Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak bisa berbuat apa-apa untuk memungkinkan potensi Sentra Boneka Sukamulya berkembang dan pengrajin semakin terpuruk dengan biaya persyaratan yang cukup mahal, lokasi yang tidak strategis dan memperluas pemasaran untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Pemberdayaan UMKM Sentra industri Boneka Sukamulya melalui pendekatan pemungkinan dapat tercapai apabila beberapa aspek pendekatan

dibawah ini bisa diwujudkan. Sub Indikator pendekatan pemungkinan tersebut dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

4.2.1.1. Menciptakan Suasana atau Iklim

Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 tentang pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib pemberlakuan SNI wajib upaya pemerintah meningkatkan kualitas produksi bisa bersaing dengan luar negeri dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan biaya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus membayar lima juta setiap perenambulan dengan biaya perpanjangan yang sama dengan biaya persyaratan melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri dalam menghadapi persainga Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pengrajin Sentra Boneka Sukamulya berkembang lebih optimal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah berupaya melalui program tersebut. Tetapi dalam perjalanannya masih terhambat dengan mahalnya persyaratan program Standar Nasional Indonesia (SNI) selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai penggerak program tersebut belum memberikan bantuan berupa

modal dan fasilitas gratis Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memungkinkan Sentra Boneka Sukamulya berkembang.

Lokasi sentara Boneka Sukamulya yang tidak strategis dan pemerintah belum mampu menyesuaikan harga sesama Sentra Boneka maka terjadilah persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan banyak pengrajin yang bangkrut maka pengrajin boneka Sukamulya keberatan dengan persyaratan program tersebut karena biaya yang cukup mahal dan harus diperpanjang setiap enam bulan sekali yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri sehingga program tersebut belum bisa dan hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang telah mengikuti program tersebut selain itu kurangnya dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memperluas pemasaran sehingga Sentra Boneka Sukamulya mencari pasar sendiri untuk mempromosikan produknya.

Suasana atau Iklim merupakan sebuah lingkungan maupun tempat yang lebih kondusif, nyaman dan strategis agar sebuah potensi yang ada dapat berkembang lebih optimal. Apabila tercipta sebuah suasana lingkungan usaha yang baik dan tempat yang strategis maka tercipta iklim usaha yang baik berupa peningkatan daya beli masyarakat, meluasnya akses pemasaran dan meningkatnya penghasilan. Itu semua bisa terwujud apabila terciptanya sebuah fasilitas tempat khusus untuk Mendapatkan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) secara gratis oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk pengrajin Boneka Sukamulya selanjutnya mengikutsertakan produk Boneka melalui Bazar yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Tabel. 4.4

Pengrajin Boneka Sukamulya

NO	NAMA USAHA	CONTACT PERSON	ALAMAT	NO. TELP
1	Persata Popon	H. Dayat Hidayat	Jl. Babakan Caringin Rt. 05/04 Sukamulya Bandung	(002) 2017413
2	Motekar	H.Yanto Rukmana	Jl. Sukamulya Indah Rt. 01/02 Sukamulya Bandung	(002) 2000785
3	Doa Sepuh	H. Atang Abdul A.	Jl. Babakan Caringin Rt. 04/04 Sukamulya Bandung	(002) 2015761
4	Iriana Dool	Iriana	Jl. Sukamulya Ujung No.68 Rt. 03/04 Sukamulya Bandung	(002) 2000733

Sumber: UMKM Sentra Boneka Sukamulya 2017

Berdasarkan tabel diatas dari empat sentra hanya satu yang mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri, saat ini telah diberlakukan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan pada empat Sentra Boneka Sukamulya melalui Program ini Penerapan program termasuk dengan kebijakan edukasi pada penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang

tergolong pada Industri UMKM seperti pengrajin Boneka Sukamulya untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang di terapkan pada tahun 2015 sampai 2016.

Tabel. 4.5

Jumlah Pengrajin Boneka Sukamulya 2012-2017

NO	Tahun	Jumlah Pengusaha
1	2012	12 Pengusaha
2	2013	12 Pengusaha
3	2014	10 pengusaha
4	2015	4 Pengusaha
5	2016	4 Pengusaha
6	2017	4 Pengusaha

Sumber: Hasil Wawancara Sentra Boneka Sukamulya Tahun 2017

Berdasarkan Tabel diatas pengusaha Sentra Boneka Sukamulya pada tahun 2012-2014 yang berjumlah 12 pengusaha aktif yang memproduksi boneka mengalami penurunan sebanyak 2 pengusaha menjadi 10 pengusaha penurunan jumlah pengusaha Sentra Boneka Sukamulya dikarenakan oleh bahan baku yang mahal sehingga menurunnya jumlah produksi boneka sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak dan komunikasi antara sesama Sentra Boneka Sukamulya yang kurang berkerja sama dalam menentukan harga produk boneka yang berakibat pada persaingan yang saling menjatuhkan antar sesama Sentra Boneka Sukamulya selain itu masalah dalam memasarkan para pengusaha Sentra Boneka Sukamulya masi mengandalkan pemasaran dari mulut kemulut

tanpa adanya upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan bazar untuk meningkatkan jumlah Produksi selain itu tidak adanya bantuan berupa modal untuk membantu pengusaha Sentra Boneka Sukamulya sehingga jumlah pengusaha mengalami penurunan dari tahun 2012-2014 yang berjumlah 2 pengusaha Sentra Boneka Sukamulya.

Boneka Sukamulya yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2014-2017 yang berjumlah 10 pengusaha aktif yang memproduksi boneka mengalami penurunan sebanyak 5 pengusaha menjadi 4 pengusaha penurunan jumlah pengusaha Sentra Boneka Sukamulya yang drastis ini dikarenakan menghadapi persainga MEA pada tahun 2015.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berupaya membantu Sentra Boneka Sukamulya melalui Program SNI Yng ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 tentang pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib pemberlakuan SNI wajib upaya pemerintah meningkatkan kualitas produksi bisa bersaing dengan luar negeri dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan biaya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus harus membayar lima juta setiap perenambulan dengan biaya perpanjangan yang sama dengan biaya persyaratan.

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri dalam menghadapi persainga Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA), bukannya membantu tetapi semakin membuat Pengrajin Boneka Sukamulya semakin terpuruk setelah adanya program tersebut. Program tersebut sebagai standar mutu Boneka sehingga bisa diterima dipasar nasional maupun *global* partisipasi pengrajin Boneka Sukamulya masi terkendala oleh mahalnya persyaratan mengikuti Program SNI karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya sentra yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal.

Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri kepada setiap Sentra Boneka Sukamulya Boneka Sukamulya setelah itu harus diperpanjang mengakibatkan semakin terpuruknya pengusaha Sentra Boneka Sukamulya dalam menghadapi MEA karena biaya untuk mengikuti program tersebut cukup mahal untuk Sentra Boneka Sukamulya. Selain itu masi terkendala oleh masalah yang belum ada solusinya dari tahun 2012 dimana bahan baku yang mahal sehingga menurunnya jumlah produksi boneka sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak dan komunikasi antara sesama Sentra Boneka Sukamulya yang kurang berkerja sama dalam menentukan harga produk boneka yang berakibat pada persaingan yang saling menjatuhkan antar sesama Sentra

Boneka Sukamulya selain itu masalah dalam memasarkan para pengusaha Sentra Boneka Sukamulya masi mengandalkan pemasaran dari mulut kemulut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melaksanakan Program SNI berupaya membantu melalui program tersebut tetapi malah tidak membantu pengrajin Sentra Boneka Sukamulya malah memberatkan selain itu tanpa adanya dukungan pemasaran berupa mengadakan bazar untuk meningkatkan jumlah Produksi dan tidak adanya bantuan berupa modal dan fasilitas gratis untuk mengikuti program untuk membantu pengusaha Sentra Boneka Sukamulya sehingga jumlah pengusaha mengalami penurunan dari tahun 2014-2017 yang berjumlah 6 pengusaha menjadi 4 pengusaha Sentra Boneka Sukamulya.

Sentra Boneka Sukamulya mengalami penurunan jumlah pengusaha boneka yang sangat drastis dari tahun 2012-2017. Setelah melakukan wawancara dengan 4 pengusaha Sentra Boneka Sukamulya yang masih bertahan sampai sekarang, diketahui penyebab penurunan dari jumlah pengusaha boneka, yaitu karena krisis ekonomi yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur, sehingga terjadinya krisis moneter adalah dimana merosotnya nilai tukar rupiah terhadap *Dollar AS* yang sangat tajam, yang terjadi pada tahun 1998 masih berdampak buruk bagi pengusaha Setra Boneka Sukamulya sampai sekarang.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) adalah pada tahun 2015 semakin membuat Pengrajin Boneka Sukamulya semakin terpuruk karena terkendala oleh biaya persyaratan mengikuti Program

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri dimana pengrajin harus membayar lima juta perenam bulan setelah itu harus diperpanjang dimana sebelum penerapan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Sentra Boneka Sukamulya sudah terpuruk terlebih adanya persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) mengakibatkan jumlah pengrajin boneka menurun drastis setah adanya Program Standar Nasional Indonesia (SNI) .

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung*:*

> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Program SNI tahun 2015 dan 2016 untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu sentra yang memiliki SNI karena biaya SNI yang cukup mahal perenambulan harus membayar lima juta setelah itu harus diperpanjang dimana kebijakan tentang limajuta perenambulan yang ditetaipakan oleh ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 karena tanpa memiliki SNI barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun global Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) jadi permasalahannya sentra Boneka Sukamulya adalah ketidak mampuan pengrajin mengikuti program tersebut karena modal selain itu belum adanya program pemerataan harga yang mengakibatkan persaingan tidak sehat antar pemilik usaha sentra boneka selain itu anggaran program tahun 2017 belum ada jadi untuk tahun ini programnya belum berjalan.(12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat menciptakan sebuah suasana lingkungan yang membuat para pelaku nyaman dan

kondusif untuk mengembangkan potensinya. Hal ini karena Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Sentra Boneka Sukamulya hanya Sosialisasi untuk mengikuti program dengan syarat mempunyai SIUP dan membayar lima juta perenambulan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri setelah itu akan diberikan lebel SNI dalam penetapan lima juta perenambulan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan sosialisasi pentingnya mengikuti program tersebut tanpa adanya bantuan berupa modal yang di salurkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kepada pengrajin boneka karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global*.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) belum berhasil melaksanakan program karena tersebut karena masih terhambat dengan mahalnya persyaratan program Standar Nasional Indonesia (SNI) selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai penggerak program tersebut belum memberikan bantuan berupa modal dan fasilitas gratis dan perenam bulan harus

membayar lima juta untuk bisa mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana kebijakan anggaran tersebut belum mempunyai aturan yang jelas tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah menetapkannya makan mengakibatkan belum memungkinkan Sentra Boneka Sukamulya berkembang.

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Memang ada program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berupa Program SNI yang di sosialisasikan ke setiap sentra tetapi harga untuk mendapatkan lebel SNI tersebut cukup mahal untuk perenam bulan harus membayar lima juta sebagai pengrajin boneka saya keberatan dengan program tersebut terlebih belum adanya bantuan modal dari dinas tersebut sehingga semakin memberatkan menghadapi persaingan MEA selain itu lokasi sentra yang tidak strategis dan jauh dari transfortasi umum dan kurangnya koordinasi mengenai pemerataan harga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antara sesama pengusaha sentra boneka terlebih dinas tidak meperluas pemasaran sehingga pengrajin sentra mencari pasar sendiri untuk memasarkan produknya. maka sentra banyak yang bangkrut selain itu pemuda disekitar sentra kurang melestarikan sentra boneka yang sudah terkenal dari tahun 1990.
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang menjadi hambatannya yaitu mahalnya persyaratan untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) lebel SNI perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap sentra Boneka Sukamulya yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri sehingga semakin terpuruknya sentra Boneka Sukamulya karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tidak bisa bersaing di pasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Gambar 4.3
Lokasi Sentra Boneka Sukamulya



(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2017)

Berdasarkan Gambar diatas lokasi sentara Boneka Sukamulya yang tidak strategis memasuki gang dimana jarak jalan menuju Sentra boneka menempuh jarak 3km maka jauh dari akses transfortasi umum mengakibatkan lokasi Sentra Boneka Sukamulya kurang strategi selain itu pemerintah belum mampu menyesuaikan harga sesama Sentra Boneka maka terjadilah persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan banyak pengrajin yang bangkrut selain itu kurangnya dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memperluas pemasaran sehingga Sentra Boneka Sukamulya mencari pasar sendiri untuk mempromosikan produknya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam upaya mengembangkan potensi Sentra Boneka Sukamulya agar lebih meningkatkan keberdayaannya sebenarnya sudah terlihat dengan menerapkan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga produk bisa bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) tetapi masi terkendala oleh persyaratan yang ditetapkan

internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus dimana pengrajin boneka harus membayar lima juta perenam bulan untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu pengembangan potensi para pelaku pun bisa dijadikan satu buah wadah untuk peningkatan kualitas kinerja para pelaku untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun seminar-seminar yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung khususya kepada para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya untuk meningkatkan sebuah produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan pengrajin Sentra Boneka Sukamulya, didapatkan sebuah data bahwa para pelaku dapat lebih berkembang secara optimal apabila tercipta suasana dan iklim yang baik berupa fasilitas tempat wadah komunikasi sesama pengrajin, lokasi yang strategis dan dukungan modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI). Harapan para pengrajin boneka saat peneliti ke lapangan adalah segera memberikan sebuah alat yang lebih canggih untuk memproduksi boneka serta melalukan bimbingan atau pelatihan kepada pengrajin Sentra Boneka Sukamulya untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga produk khususnya boneka dapat bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa keberhasilam Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Bandung belum dapat menciptakan sebuah suasana lingkungan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya. Hal ini karena Akses menuju Sentra Boneka Sukamulya yang masuk gang dan tidak Strategis selain itu Ketidak mampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk menyetarakan harga yang mengakibatkan persaingan pengrajin yang tidak sehat.

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Program SNI untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu sentra yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* selain itu lokasi Sentra Boneka Sukamulya kurang strategi dan pemerintah belum mampu menyesuaikan harga sesama Sentra Boneka maka terjadilah persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan banyak pengrajin yang bangkrut selain itu kurangnya dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dalam menciptakan suasana atau iklim agar potensi para pengrajin Boneka Sukamulya.

4.2.1.2 Menghilangkan sekat kultur dan struktur

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur dan struktur yang menghambat. Arti dalam subindikator ini adalah untuk

mendukung terciptanya suasana atau iklim usaha yang kondusif. maka proses pemberdayaan harus mampu menghilangkan segala jenis kelompok kultur yang menjadi persaingan usaha kurang sehat.

Srntra Boneka Sukamulya adalah masyarakat setempat yang sama kultur tetapi tidak saling berkerjasama ini menjadi penghambat para pelaku berkembang apabila mereka satu kultur yang sama tetapi kurang berkerjasama dan mengakibatkan persaingan yang saling menjatuhkan. Sedangkan sekat struktur adalah batasan atara para pelaku Sentra Boneka Sukamulya dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Apabila ada batasan yang terlalau menyulitkan para pelaku usaha dalam membutuhkan bantuan dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, maka potensi ini akan jalan ditempat dan tidak ada pengembangan yang baik.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam upaya untuk menghilangkan skat-skat kulutur dan struktur yang dapat menghambat para pengrajin boneka adalah dengan melakukan komunikasi yang baik terhadap pelaku Sentra Boneka Sukamulya. Komunikasi tersebut dapat di lakukan pada saat melakukan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kesemua Sentra Boneka Sukamulya. Komunikasi yang baik adalah bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk kedalam menjalankan produk pemerintah. Membina Komunikasi yang baik adalah langkah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terhadap pengrajin Boneka Sukamulya.

Komunikasi yang baik adalah langkah untuk mendukung proses pemberdayaan, tanpa harus melihat kultur dan struktur yang ada. Dari komunikasi yang baik akan manciptakan kenyamanan dalam berinteraksi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan para pengrajin boneka sebahgai mitra pemerintahan untuk mengembangkan perekonomian. Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk membebaskan sekat-sekat kultur maupun struktur yang menghambat selain dengan komunikasi yang baik, yaitu dengan cara mempermudah birokrasi pelayanan yang dibutuhkan oleh para pengrajin boneka.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mempersilahkan para pengrajin Boneka Sukamulya untuk langsung datang ke kantor bagian industri formal yang langsung menangani sentra-sentra yang ada di Kota Bandung. Melalui jalinan komunikasi yang baik, maka arah sebuah pemikiran para pelaku usaha dengan Dinas akan sama dan tercipta kebijakan pengembangan Sentra Boneka Sukamulya akan sesuai dengan yang dibutuhkan dilapangan pekerjaan.

Komunikasi yang baik akan terciptanta kebijakan yang pro masyarakat untuk dapat mendukung potensi Sentra Boneka Sukamulya agar kebutuhan financial dan kesejahteraan para pelaku usaha lebih meningkat. Dengan adanya komunikasi dua arah yang intensif, maka akan berdampak baik bagi harmonisasi terhadap semua Sentra Boneka Sukamulya yang peneliti amati dilapangan berjalan tidak terlalu kompak.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti dapat menganalisis sejauh ini untuk menghilangkan batasan antar kultur dirasa berjalan dengan

sendirinya. Walaupun sama kultur, persaingan usaha yang saling menjatuhkan sering terjadi. Sedangkan batasan struktur antara para pelaku usaha dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memang belum baik karena sama-kurang adanya Komunikasi karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung jarang melakukan Komunikasi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk Sentra Boneka Sukamulya sebetulnya jarang terjadi karena harus menunggu program atau kegiatan yang dilakukan oleh dinas selain itu setelah ada program dinas baru ke sentra Boneka Sukamulya . (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Peneliti mendapatkan sebuah fakta bahwa upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menghilangkan sekat-sekat kulur maupun struktur ini dirasa kurang baik.

Komunikasi ini perlu ditunjang oleh fasilitasi seperti balai pertemuan di Sentra Boneka Sukamulya untuk duduk bersama maupun berkomunikasi agar pemerintah lebih dekat dengan para pelaku usaha. Selama ini, komunikasi dijalin sewaktu waktu disaat berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Sedangkan intensitas komunikasi ini seharusnya lebih ditingkatkan akan tercipta sebuah kedekatan bersama. Selain itu, komunikasi

mengenai permasalahan yang ada, hanya sebatas komunikasi dan tidak ada tindak lanjut nyatanya. Sehingga apa yang telah dikomunikasikan hanya sebatas wacana.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini langkah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk membebaskan sekat-sekat kultur dan struktural yang menghambat para Pengrajin Boneka Sukamulya belum baik karena belum merangkul dan berkomunikasi kepada para pelaku usaha. Agar pengrajin boneka memiliki wadah atau tempat berkumpul sebagai sarana komunikasi yang nyaman harapan para pelaku memiliki fasilitas tempat komunikasi berupa balai pertemuan.

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Di sentra Boneka Sukamulya untuk komunikasinya kurang bagus antar sesama sentra walaupub sama kebudayaan tetapi tidak ada kekompakan dalam hal penyetaraan harga atau sekedar bertegur sapa yang mengakibatkan adanya persaingan saling menjatuhkan antar sentara . (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka masyarakat belum bisa menghilangkan sekat-sekat kulur maupun struktur antar Sentra Boneka Sukamulya yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan saling menjatuhkan. komunikasi ini perlu ditunjang oleh fasilitasi seperti balai pertemuan di Sentra Boneka Sukamulya untuk duduk bersama maupun berkomunikasi agar pemerintah lebih dekat dengan para pelaku usaha. Selama ini komunikasi antar Sentra Boneka Sukamulya tidak terjalin dengan baik. Sedangkan intensitas komunikasi ini seharusnya lebih ditingkatkan akan tercipta sebuah kedekatan bersama.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini untuk dapat membebaskan sekat-sekat kultur dan struktural yang menghambat para Pengrajin Boneka Sukamulya sejauh ini belum baik karena belum adanya komunikasi yang baik antar para pelaku usaha. Harapan pengrajin boneka agar komunikasi yang baik berupa memiliki fasilitas wadah atau tempat berkumpul sebagai sarana komunikasi yang nyaman sehingga para pelaku memiliki fasilitas tempat komunikasi berupa balai pertemuan sehingga terjadi komuikasi yang baik pula.

Berdasarkan Seluruh uraian dan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa keberhasilam Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat membebaskan sekat-sekat kultur dan struktural yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya. perlu suatu program yang lebihnyata. Para pelaku Sentra Boneka Sukamulya masih menunggu wujud nyata kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memfasilitasi para Pengrajin boneka agar potensi ini tidak mati dan terus berkembang. Dengan adanya fasilitas infrastruktur maupun wadah tersebut maka suasana dan iklim yang lebih baik, nyaman, tenang, kondusif, dan tempat untuk berkomunikasi lebih dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, fasilitas tersebut pun bisa menjadi wadah para pelaku untuk tetap menjaga keharmonisan maupun kekeluargaan diantara para pelaku walau berbeda latar belakang kultur.

Hubungan pemerintah dengan para pelaku pun bisa lebih dekat dengan cara duduk bersama. Fasilitas berupa balai pertemuan yang menjadi satu bangunan

dengan showroom dan balai pengembangan perlu dibangun. Sehingga para pelaku usaha terfasilitasi dengan baik dan pemberdayaan pengrajin Boneka Sukamulya.

4.2.2 Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya Melalui Pendekatan Penguatan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka Pendekatan Penguatan mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki para pelaku Sentra Boneka Sukamulya. Hal ini dilakukan agar para pelaku dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan melalui Pendekatan Penguatan harus dapat menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Sub Indikator pendekatan Penguatan tersebut dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

4.2.2.1 Penguatan Pengetahuan

Penguatan pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah pengetahuan pentingnya mengikuti sosialisai Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah

yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan memberikan penguatan terhadap produk yang dihasilkan pengrajin Boneka Sukamulya.

Gambar 4.4

(Kegiatan Sosialisasi Penerapan Program SNI)



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2014

Berdasarkan Gambar diatas terlihat sosialisasi Program Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dilakukan untuk memperkuat pengetahuan tersebut dapat berupa program-program berupa Sosialisai Pentingnya mengikuti program dan proses kegiatan belajar yang berkaitan dengan peningkatan daya saing sebuh produk Boneka yang dihasilkan para pengrajin Boneka. Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI)

adalah sebagai standar mutu Boneka sehingga bisa diterima dipasar nasional maupun *global* dalam persiapan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA). Selain itu memperkuat pengetahuan juga dapat berupa bagaimana tingkat pendidikan para pengrajin boneka yang mengikuti program karena berdasarkan tingkat pendidikan para pengrajin bisa berpartisipasi bagaimana pentingnya mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Selain itu upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung perlu meningkatkan ketepatan waktu produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar produk bisa stabil untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA)

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Program SNI ini wajib dan sangat diharuskan karena ini menyangkut keselamatan untuk Boneka Sukamulya inikan wajib mengikuti program tentunya sangat dibutuhkan memenuhi standar menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) adapun upaya yang telah dilakukan pertama sudah dilakukan sosialisasi ditahun 2015 tentang SNI wajib yang pesertanya Sentra Boneka Sukamulya kemudian soal sertifikasi ada kendala karena mahal dan masa berlakunya hanya enam bulan dan memberatkan sentra Boneka Sukamulya dimana dinas kita tidak memberikan modal selain itu para pengrajin yang berpendidikan hanya sebatas SMA tidak begitu memahami pentingnya program SNI tersebut . (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan karena sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah

penguatan pengetahuan sosialisai Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadaspin Masyarakat Ekonomi *ASEAN*(MEA) dengan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan memberikan penguatan terhadap produk yang dihasilkan pengrajin Boneka Sukamulya.

Pendidikan para pengrajin boneka yang hanya tamatan SMA sehingga kurang berpartisipasi bagaimana pentingnya mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan belum ada upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung meningkatkan ketepatan waktu produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar produk bisa stabil untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Partisipasi pengrajin Boneka Sukamulya masi terkendala oleh mahalnya persyaratan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Tingkat pendidikan para pengrajin boneka yang hanya tamatan SMA maka kurang berpartisipasi bagaimana pentingnya mengikuti program Standar Nasional

Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Selain itu belum ada upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung perlu meningkatkan ketepatan waktu produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar produk bisa stabil untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Ditahun 2015 dan 2016 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Sosialisasi Program SNI dimana untuk mengikuti Program Tersebut syaratnya harus mempunyai Siup dan membayar lima juta dan hanya berlaku enam bulan setelah itu harus diperpanjang untuk Program tersebut sebagai pengrajin saya keberatan mengikuti Program tersebut selain itu tidak adanya koordinasi ketepatan waktu jumlah produk sehingga produk tidak sama antara sesama sentra.
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan karena sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah penguatan sosialisai Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan memberikan penguatan terhadap produk yang dihasilkan pengrajin Boneka Sukamulya yang menjadi hambatan nya yaitu mahalnya persyaratan untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap Sentra

Boneka Sukamulya yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus sehingga semakin terpuruknya Sentra Boneka Sukamulya karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tidak bisa bersaing di pasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) Selain tingkat pendidikan para pengrajin boneka yang hanya tamatan SMA kurang berpartisipasi bagaimana pentingnya mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan belum ada upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung meningkatkan ketepatan waktu produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar produk bisa stabil untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan ini karena sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah penguatan pengetahuan sosialisai Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan memberikan penguatan terhadap produk yang dihasilkan pengrajin Boneka Sukamulya.

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi hambatan nya yaitu mahalnya persyaratan untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap sentra Boneka Sukamulya yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri. Selain tingkat pendidikan para pengrajin boneka yang hanya tamatan SMA kurang berpartisipasi bagaimana pentingnya mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan belum ada upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung perlu meningkatkan ketepatan waktu produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar produk bisa stabil untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

4.2.2.2 Memperkuat Kemampuan

Memperkuat Kemampuan ini sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah Kemampuan agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadaspin Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan memberikan penguatan terhadap produk yang di hasilkan pengrajin Boneka Sukamulya melalui Pelatihan dan modal yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Memperkuat Kemampuan tersebut dapat berupa modal atau bantuan fasilitas gratis untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebagai standar mutu Boneka sehingga bisa diterima dipasar nasional maupun *global*. Selain itu memberikan pelatihan oleh Aparatur melalui sosialisai Program Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga produk pengrajin boneka bisa bersaing dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA)

Memperkuat kemampuan adalah proses memberikan sebuah pelatihan oleh aparatur agar para pengrajin Boneka Sukamulya dapat menumbuh kembangkan kemampuan atau kapasitas para pelaku usaha dan kepercayaan dirinya atas produk yang dihasilkan karena telah mempunyai lebel Standar Nasional Indonesia (SNI). Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan menyelenggarakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan penguatan kemampuan ini maka para pengrajin Boneka Sukamulya produknya bisa lebih meningkatkan daya saing dan produktifitasnya memenuhi kebutuhan pasar Nasional maupun *global* .

Gambar 4.5

(Lebel SNI)



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2017

Berdasarkan gambar diatas setelah melakukan Standar Nasional Indonesia Program (SNI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pengrajin boneka akan diberikan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan memudahkan pemasaran nasional maupun *global* dalam upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Kemampuan pengrajin setelah mengikuti Program SNI akan memberikan kemampuan dalam pemasaran produk yang lebih luas tentunya sangat dibutuhkan memenuhi standar menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) adapun upaya yang telah dilakukan pertama sudah sosialisas adalah ditahun 2014 oleh aparatur tentang SNI wajib yang pesertanya Sentra Boneka Sukamulya kemudian soal lebel ada kendala karena mahal dan masa berlakunya hanya enam bulan setelah itu aparatur akan mensosialisasi program tersebut semakin memberatkan sentra Boneka Sukamulya dimana dinas kita tidak memberikan modal.
> (12/06/2017)

Berdarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah proses memberikan sebuah pelatihan oleh aparatur agar para pengrajin Boneka Sukamulya dapat menumbuh kembangkan kemampuan atau kapasitas para pelaku usaha dan kepercayaan dirinya atas produk yang dihasilkan. Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan menyelenggarakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan penguatan kemampuan ini maka para pengrajin Boneka Sukamulya produknya bisa lebih meningkatkan daya saing dan produktifitasnya memenuhi kebutuhan pasar Nasional maupun *global*.

Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung baru bisa mensosialisasikan bila masyarakat membayar lima juta perenam bulan membuat pengrajin keberatan untuk berpartisipasi. Pengrajin Boneka Sukamulya yang hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang mengikutinya karena terkendala oleh mahalnya persyaratan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang cukup mahal dan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan Kemampuan produk tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA)

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Sosialisasi Program SNI dimana untuk mengikuti Program Tersebut syaratnya harus mempunyai Siup dan membayar lima juta dan hanya berlaku enam bulan setelah itu harus diperpanjang untuk Program tersebut sebagai pengrajin saya keberatan mengikuti Program Tersebut tetapi dengan mengikuti Program tersebut akan memerikan kemampuan produksi dan produk mudah untuk dipasarkan.
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan karena sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah penguatan sosialisai Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan memberikan penguatan terhadap produk yang di hasilkan pengrajin Boneka Sukamulya yang menjadi hambatan nya yaitu mahalnya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap Sentra Boneka Sukamulya sehingga semakin terpuruknya Sentra Boneka

Sukamulya karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tidak bisa bersaing di pasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah Bandung sudah proses memberikan sebuah pelatihan agar para pengrajin Boneka Sukamulya dapat menumbuh kembangkan kemampuan atau kapasitas para pelaku usaha dan kepercayaan dirinya atas produk yang dihasilkan.

Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan menyelenggarakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan penguatan kemampuan ini maka para pengrajin Boneka Sukamulya produknya bisa lebih meningkatkan daya saing dan produktifitasnya memenuhi kebutuhan pasar Nasional maupun *global*. Tetapi hal ini terkendala oleh biaya karena pengrajin Boneka Sukamulya keberatan mahalnya persyaratan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang cukup mahal dan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan kemampuan produk tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi bila pengrajin membayar lima juta perenam bulan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri harus maka program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar

nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA)

4.2.3 Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya Melalui Pendekatan Perlindungan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Perlindungan adalah melindungi Masyrakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, perlindungan merupakan aspek pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk melindungi pengrajin Sentra Boneka Sukamulya Perlindungan tersebut diarahkan terutama kepada kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan perlindungan meliputi dua indikator, yaitu melindungi masyarakat lemah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Melindungi masyarakat lemah adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam melindungi Pengrajin Boneka Sukamulya melalui sebuah legalitas izin usaha agar dapat lebih berkembang, maju, dan lebih berdaya. Legalitas tersebut berupa Peraturan harus memiliki Izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) utuk bisa mendaftar Program Standar Nasional Indonesia (SNI).

Upaya untuk melindungi para Pengrajin Boneka Sukamulya sejauh ini belum tercapai. Terlebih pengrajin kesulitan memasarkan sebuah produk boneka

yang dihasilkan karena belum mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 yang dilakuakn oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai perlindungan produk selain itu perlunya dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk mengadakan bazar khususnya untuk pengrajin Boneka.

Menghapus diskriminasi adalah bentuk penghapusan persaingan yang tidak sehat cukup baik dan berjalan dengan sendirinya, upaya yang dilakukan dinas yaitu mengawasi roda perdagangan dan persaingan dalam ruang lingkup Sentra Boneka Sukamulya. Pengawasan untuk menghapus segala bentuk persaingan yang kurang sehat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung membangun. Sub Indikator pendekatan perlindungan tersebut dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

4.2.3.1 Melindungi Masyarakat Lemah

Melindungi masyarakat lemah dalam ruang lingkup Sentra Boneka Sukamulya yaitu melindungi para pelaku usaha yang belum memiliki asas legalitas dan administrasi perizinan dalam melakukan sebuah usaha dan standarisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui Peraturan mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI). Aspek Pendekatan pemberdayaan ini merupakan hal penting agar para pengrajin Boneka Sukamulya mempunyai sebuah legalitas dan standarisi produk yang memiliki Standar Nasional

Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 sehingga membuat mereka mampu bersaing menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

legalitas resmi dan standarisasi tersebut sangat penting untuk melindungi para pelaku dan produk usaha terlebih Peraturan izin mendirikan sebuah bangunan agar Sentra Boneka dapat lebih kondusif dalam melakukan kegiatan usaha dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya untuk persaingan sehingga produk bisa diterima dipasar nasional maupun *global*.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sejauh ini hanya memberikan sosialisasi untuk mempunyai Peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) agar bisa mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar para pengraji Sentra Boneka Sukamulya dapat memiliki segala bentuk perizinan dan standarisasi. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memang sering melakukan sosialisasi agar para pelaku usaha melengkapi administrasi perizinan setelah itu mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam upaya melindungi Pengrajin Boneka Sukamulya melalui sebuah legalitas dan standarisasi produk boneka.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Untuk melindungi produk melalui program SNI persyaratan Pertama harus bermerek jelas dan mempunyai izin keterangan usaha dari kelurahan setelah itu membayar lima juta perenam bulan untuk setiap sentra Boneka jadi kalau disentra Boneka Suamulya ada empat sentra kalau digabung harus membayar dua puluh juta untuk memenuhi persyaratan mengikuti Program SNI.
> (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah mempunyai sebuah legalitas dan standarisi produk yang Standar Nasional Indonesia (SNI) yang membuat mereka mampu bersaing menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA). Sebuah legalitas resmi dan standarisasi tersebut sangat penting untuk melindungi para pelaku dan produk usaha terlebih izin mendirikan sebuah bangunan agar dapat lebih kondusif dalam melakukan kegiatan usaha dan bisa mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya untuk persaingan sehingga produk bisa diterima di nasional maupun *global*.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam melindungi masyrakat lemah dirasa kurang atau tidak sama sekali dimana

> bantuan hanya berupa sosialisasi pentingnya mengikuti Program SNI selain itu tidak adanya bantuan berupa modal untuk melindungi pengrajin Boneka sukamulya yang semakin sulit menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat lebel Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum melindungi pengrajin Boneka Sukamulya yang terkendala oleh mahalnya persyaratan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Produk yang di hasilkan pengrajin Boneka Sukamulya yang menjadi hambatan nya yaitu mahalnya persyaratan untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap Sentra Boneka Sukamulya yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri sehingga semakin terpuruknya Sentra Boneka Sukamulya karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tidak bisa bersaing di pasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka

Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum melindungi pengrajin Sentra Boneka Sukamulya untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dengan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung maka memberikan perlindungan terhadap produk yang di hasilkan pengrajin Boneka Sukamulya yang menjadi hambatan adalah hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang mengikutinya karena mahalnya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap Sentra Boneka Sukamulya terlebih dalam menghadapi persaingan MEA.

4.2.3.2 Penghapusan Diskriminasi

Penghapusan diskriminasi adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan dalam persaingan para pelaku Sentra Boneka Sukamulya. Diskriminasi sendiri diartikan sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil terhadap sesorang atau kelompok. Dalam dunia usaha, ketidak adilan tersebut biasanya disebut praktek monopli yang mengakibatkan sebuah persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam aspek penghapusan diskriminasi adalah sebuah pengembangan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum ada regulasi, fasilitasi,

pengawasan serta penyediaan infrastruktur yang mengakibatkan sesama Sentra Boneka Sukamulya tidak bisa menetapkan harga yang sama dan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan, sejauh ini dari pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan. Bahwa hubungan para pelaku Sentra Boneka Sukamulya belum berjalan sehat ada persaingan yang saling menjatuhkan antara pelaku pemodal besar dan pemodal kecil. Para pelaku Sentra Boneka Sukamulya memiliki gaya berwirausaha masing-masing dan dalam penentuan harga produk setiap Sentra Boneka Sukamulya berbeda-beda maka tidak adanya koordinasi untuk penetapan harga yang sama. Program Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun regulasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sendiri tidak menyentuh hingga hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung seakan tidak mau tahu keterpurukan Sentra Boneka Sukamulya.

Berdasarkan penjelasan diatas, upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam penghapusan diskriminasi dan persaingan yang tidak sehat sejauh ini belum melaksanakan program apapun untuk menyetarakan harga maka antar pengrajin Sentra Boneka Sukamulya saling menjatuhkan. Sehingga para pelaku usaha berjalan masing-masing dengan gaya yang dimiliki para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Untuk menghadapi persaingan yang tidak sehat di sentra Boneka Sikamulya soal ketentuan harga produk yang sama belum ada program tersebut untuk

> itu dinas belum memberikan sosialisasi sehingga pengrajin boneka menentukan harga diatur oleh masing-masing pemilik sentra tesebut. (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum berjalan sehat ada persaingan yang saling menjatuhkan antara pelaku pemodal besar dan pemodal kecil. Para pelaku Sentra Boneka Sukamulya memiliki gaya berwirausaha masing-masing dan dalam penentuan harga produk setiap Sentra Boneka Sukamulya berbeda-beda maka tidak adanya koordinasi untuk penetapan harga yang sama. Hal ini karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak berfokus pada pemerataan harga yang mengakibatkan persaingan antar pengrajin yang tidak sehat maka peran pemerintah dalah hal ini kurang memberikan dukungan terhadap Sentra Boneka Sukamulya dalam pengawasan soal harga yang belum merata.

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mengawasi soal pemerataan harga produk boneka belum ada sehingga para pengrajin menentukan harga sendiri-sendiri yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar pengrajin sentra Boneka Sukamulya. (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mengawasi soal pemerataan harga produk boneka belum ada maka persaingan yang saling menjatuhkan antara pelaku pemodal besar dan pemodal kecil. Para pelaku Sentra Boneka Sukamulya memiliki gaya berwirausaha masing-masing dan dalam penentuan harga produk setiap Sentra Boneka

Sukamulya berbeda-beda maka tidak adanya koordinasi untuk penetapan harga yang sama. Hal ini karena pengrajin Sentra boneka Sukamulya yang tidak saling berkoordinasi antar pengusaha sentra boneka yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan semakin terlihat ketimpangan antar harga yang berimbas pada penjualan produk boneka yang tidak stabil.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa hubungan para pelaku Sentra Boneka Sukamulya belum berjalan sehat ada persaingan yang saling menjatuhkan antara pelaku pemodal besar dan pemodal kecil. Para pelaku Sentra Boneka Sukamulya memiliki gaya berwirausaha masing-masing dan dalam penentuan harga produk setiap Sentra Boneka Sukamulya berbeda-beda maka tidak adanya koordinasi untuk penetapan harga yang sama. Program Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun regulasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sendiri tidak menyentuh hingga hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung seakan tidak mau tahu keterpurukan Sentra Boneka Sukamulya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak berfokus pada pemerataan harga yang mengakibatkan persaingan antar pengrajin yang tidak sehat maka peran pemerintah dalah hal ini kurang memberikan dukungan terhadap Sentra Boneka Sukamulya dalam pengawasan soal harga yang belum merata selain itu karena pengrajin Sentra boneka Sukamulya yang tidak saling berkoordinasi antar pengusaha Sentra Boneka Sukamulya yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan semakin terlihat ketimpangan antar harga yang berimbas pada penjualan produk boneka yang tidak stabil.

4.2.4 Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya Melalui Pendekatan Penyokongan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar Masyarakat mampu menjalankan peran-peran dan tugas kehidupan Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya melalui aspek pendekatan penyokongan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memberikan bimbingan dan dukungan agar pengrajin Sentra Boneka Sukamulya mampu menhadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Pemberdayaan melalui pendekatan penyokongan dengan memberikan sebuah bimbingan kepada para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya sejauh ini cukup baik. Upaya dinas memberikan sebuah dukungan bimbingan dan arahan agar para pelaku dapat berkembang sejauh ini melalui bimbingan berupa sosialisasi pentingnya mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebagai standar mutu Boneka sehingga bisa diterima dipasar nasional maupun

global dalam persiapan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memberikan sebuah dukungan agar para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya untuk lebih berdaya saing belum tepat sesuai dengan yang dibutuhkan para pelaku usaha. Sebuah dukungan yang baik maka akan berdampak pada daya saing yang baik dan lebih kuat. Dengan adanya dukungan yang baik untuk memfasilitasi gratis Program Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kemudahan mendapatkan permodalan yang tepat kepada para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya akan semakin meningkatkan penjualan hasil produk dan diterima di pasar nasional maupun *global.* Sejauh ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mendukung para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya Melalui Bazar atau pameran sebagai upaya peningkatan penjualan produk Boneka Sukamulya.

4.2.4.1 Memberikan Bimbingan

Pemberdayaan Boneka Sukamulya melalui aspek memberikan bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah melaksanakan sebuah Program Standar Nasional Indonesia (SNI). Memberikan sebuah dukungan adalah Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui bimbingan berupa sosialisasi pentingnya mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui

Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebagai standar mutu Boneka sehingga bisa diterima dipasar nasional maupun *global* dalam persiapan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Program SNI tahun 2015 dan 2016 untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi berupa bimbingan penerapan SNI setelah dilakukannya program tersebut hanya satu sentra yang memiliki SNI karena biaya SNI yang cukup mahal karena tanpa memiliki SNI barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun global Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) jadi permasalahannya sentra Boneka Sukamulya adalah ketidak mampuan pengrajin mengikuti program tersebut karena modal selain itu lokasi sentra boneka yang kurang strategis dan program tahun 2017 belum ada jadi untuk tahun ini programnya belum berjalan dan hanya memberikan dukungan berupa bazar yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung .
> (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah melakukan bimbingan kepada para pengrajin Boneka Sukamulya hal ini partisipasi pengrajin Boneka Sukamulya yang terkendala oleh mahalnya persyaratan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan bimbingan berupa pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia

(SNI) karena biaya yang cukup mahal harus mempunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perenam bulan membayar lima juta untuk setiap Sentra boneka yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Memang ada program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berupa Program SNI hanya berupa sosialisasikan kesetiap sentra tetapi harga untuk mendapatkan lebel SNI tersebut cukup mahal untuk perenam bulan harus membayar lima juta sebagai pengrajin boneka saya keberatan dengan program tersebut terlebih belum adanya bantuan modal dari dinas tersebut sehingga semakin memberatkan menghadapi persaingan sekarang maka sentra banyak yang bangkrut selain itu pemuda disekitar sentra kurang melestarikan sentra boneka yang sudah terkenal dari tahun 1990.
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang menjadi hambatannya yaitu mahalnya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap Sentra Boneka Sukamulya sehingga semakin terpuruknya Sentra Boneka Sukamulya karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tidak bisa bersaing di pasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum memberikan dukungan berupa modal atau fasilitas gratis Program

Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut mengakibatkan Sentra Boneka Sukamulya semakin terpuruk dengan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa keberhasilan Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum berhasil karena hanya membimbing berupa sosialisasi pentingnya mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) para pengrajin Boneka Sukamulya hal ini juga kurangnya partisipasi pengrajin Boneka Sukamulya yang terkendala oleh mahalnya persyaratan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan bimbingan berupa pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal harus mempunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perenam bulan membayar lima juta untuk setiap Sentra boneka yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

4.2.4.2 Memberikan Dukungan

Pemberdayaan Boneka Sukamulya melalui aspek memberikan Dukungan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah

melaksanakan sebuah Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013. Memberikan sebuah dukungan adalah Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui dukungan berupa modal dan fasilitasgratis mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebagai standar mutu Boneka sehingga bisa diterima dipasar nasional maupun *global* dalam persiapan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Program SNI tahun 2015 dan 2016 untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi rupa dukungan penerapan SNI setelah dilakukannya program tersebut hanya satu sentra yang memiliki SNI karena biaya SNI yang cukup mahal karena tanpa memiliki SNI barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun global tanpa dukungan modal terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) jadi permasalahannya sentra Boneka Sukamulya adalah ketidak mampuan pengrajin mengikuti program tersebut karena modal selain itu lokasi sentra boneka yang kurang strategis dan program tahun 2017 belum ada jadi untuk tahun ini programnya belum berjalan dan hanya memberikan dukungan berupa bazar yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung .
> (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah melakukan bimbingan kepada para pengrajin Boneka Sukamulya hal ini partisipasi pengrajin Boneka Sukamulya yang terkendala oleh mahalnya persyaratan pemodalan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan dukungan berupa pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal harus mempunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perenam bulan membayar lima juta untuk setiap Sentra boneka Sukamulya yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri.

Modal dan fasilitas gratis sangat diharapkan pengrajin boneka untuk mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) selain itu Dinas kurang mendukung para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya Melalui Bazar atau pameran sebagai upaya dukungan penjualan produk Boneka Sukamulya.

Gambar 4.6

Kegiatan Pengrajin Sentra Boneka Sukamulya



(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Rumah Produksi Sentra Boneka Sukamulya, 2017)

Dari data gambar diatas, dapat terlihat bahwa alat-alat produksi yang digunakan oleh Pengrajin Boneka Sukamulya masih bersifat manual tenaga manusia. Dibandingkan dengan alat produksi yang digunakan oleh Negara maju maupun para pemilik modal besar yang lebih jauh mendukung kemajuan usahanya. Tidak ada salahnya apabila para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya melihat Negara yang lebih maju.

Pengrajin Sentra Boneka Sukamulya memerlukan sebuah dukungan fasilitasi akses untuk dapat memiliki alat produksi yang lebih modern. Beberapa alat produksi boneka modern dengan tekhnologi digital dan otomatis tersebut sudah ada di Indonesia. Tetapi alat tersebut biasanya dimiliki oleh para pelaku modal besar.

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Memang ada program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berupa Program SNI hanya berupa dukungan berupa sosialisasikan program kesetiap sentra tetapi harga untuk mendapatkan lebel SNI tersebut cukup mahal untuk perenam bulan harus membayar lima juta sebagai pengrajin boneka saya keberatan dengan program tersebut terlebih belum adanya bantuan tanpa adanya fasilitas atau alat modern untuk sentra modal dari dinas tersebut sehingga semakin memberatkan menghadapi persaingan sekarang maka sentra banyak yang bangkrut selain itu pemuda disekitar sentra kurang melestarikan sentra boneka yang sudah terkenal dari tahun 1990.
> (14/06/2017)

Hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang menjadi hambatan nya yaitu mahalnya persyaratan yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perenam bulan harus membayar lima juta rupiah setiap Sentra Boneka Sukamulya sehingga semakin terpuruknya Sentra Boneka Sukamulya karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tidak bisa bersaing di pasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum memberikan dukungan berupa modal, alat modern dan fasilitas gratis Program Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut mengakibatkan Sentra Boneka Sukamulya semakin terpuruk dengan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa keberhasilam Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum maksimal hanya mendukung berupa sosialisasi pentingnya

mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) tanpa memberikan dukungan modal untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) tanpa adanya bantuan alat sehingga pegrajin boneka semakin terpuruk selain itu para pengrajin Boneka Sukamulya kurang brpartisipasi para pengrajin Boneka Sukamulya yang terkendala oleh mahalnya persyaratan pemodalan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan dukungan berupa pengetahuan tentang Pentingnya mengikuti Program hanya memberikan Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal harus mempunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perenam bulan membayar lima juta untuk setiap Sentra Boneka Sukamulya yang ditetapkan internal Bidang Sumber Daya dan Investasi Industri karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA). selain itu Dinas belum mendukung memberikan alat sehigga pengrajin memproduksi secara manual dan belum mendukung produksi para pengrajin Sentra Boneka Sukamulya Melalui Bazar atau pameran sebagai upaya dukungan penjualan produk Boneka Sukamulya.

4.2.5 Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya Melalui Pendekatan Pemeliharaan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemberdayaan Sentra Boneka Sukamulya melalui aspek Pendekatan Pemeliharaan merupakan upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memelihara kondisi yang tetap kondusif agar tetap terjadi keseimbangan. Pemberdayaan melalui pendekatan pemeliharaan ini meliputi indikator memelihara kondisi yang kondusif dan memelihara keselarasan antara para pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Memelihara kondisi yang kondusif merupakan indikator pertama untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menjaga sebuah kondisi yang tetap kondusif mengembangkan potensi Sentra Boneka Sukamulya. Melalui pelaksanaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA), agar semua Sentra Boneka Sukamulya bisa mengikuti program tersebut diperlukan kerjasama antar Sentra Boneka Sukamulya sehingga terjadi keselarasan selain itu regulasi tentang bantuan modal agar Sentra Boneka Sukamulya potensial ini akan terus dikembangkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan terus menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha

agar tetap kondusif. Sehingga apabila suasana dan kondisi tersebut tetap kondusif maka potensi ini dapat terus berkembang.

Memelihara keselarasan antara para pengrajin Boneka Sukamulya, keselarasan dibangun dibutuhkannya pertisipasi dan kerjasama antar pengrajin Boneka Sukamulya untuk mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di tetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sehingga terjadi keselarasan menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung harus mampu memelihara Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tetap diterapkan untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya

4.2.5.1 Memelihara Kondisi Yang Kondusif

Memelihara kondisi yang kondusif adalah aspek pemberdayaan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara Sentra Boneka Sukamulya untuk mengembangkan potensi Sentra Boneka Sukamulya. Melalui pelaksanaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013, agar semua Sentra Boneka Sukamulya bisa mengikuti program tersebut diperlukan kerjasama antar Sentra Boneka Sukamulya sehingga terjadi keselarasan regulasi selain itu regulasi tentang bantuan modal agar Sentra Boneka Sukamulya potensial ini akan terus dikembangkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan

terus menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif.

Suasana dan kondisi tersebut apabila tetap kondusif maka potensi ini dapat terus berkembang. Selain itu anggaran untuk tahun 2017 Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum ada sehingga program tersebut tidak berjalan.

Sasaran tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan dan program sehingga tercipta sebuah pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat dari data yang peneliti dapatkan dalam tabel RPJMD dibawah ini :

Tabel 4.6

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Misi ke 4: Membangun Perekonomian yang Maju, Kokoh, dan Berkeadilan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan produk-produk unggulan Kota Bandung	Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

		Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM	Program penciptaan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang kondusif

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, 2017)

Dari tabel diatas dapat peneliti jelaskan bahwa arah kebijakan maupun program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah mengembangkan dan memelihara sentra-sentra potensial dan unggulan Kota Bandung. Maka dari itu, hal ini menjadi sebuah jaminan bahwa memang keberlanjutan dan pemeliharaan untuk tetap memberdayakan UMKM Sentra Boneka Sukamulya khususnya bisa dan harus terus terjaga.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung:

> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Program SNI tahun 2015 dan 2016 untuk semua Sentra Boneka Sukamulya bisa mengikuti program tersebut untuk menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif dibutuhkannya partisipasi mengikuti program SNI sebagai upaya dinas menjaga dan memelihara usaha agar tetap kondusif dimana program ini untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) saat ini dan untuk anggaran program SNI untuk tahun 2017 belum ada.
> (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat

menciptakan sebuah suasana lingkungan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya.

Partisipasi Sentra Boneka Sukamulya yang mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi tanpa adanya fasilitas gratis dan setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mampu menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif potensi khusunya Sentra Boneka Sukamulya ini dapat terus berkembang.

Anggaran nggaran untuk tahun 2017 Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum ada sehingga program tersebut tidak berjalan sehingga dinas tidak bisa berbuat apa-apa untuk memelihara Program Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2017.

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah:

> Memang ada program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berupa Program SNI yang di sosialisasikan ke setiap sentra tetapi harga untuk mendapatkan lebel SNI tersebut cukup mahal untuk perenam bulan harus membayar lima juta sebagai pengrajin boneka saya keberatan dengan program tersebut terlebih belum adanya bantuan modal dari dinas tersebut sehingga semakin memberatkan menghadapi persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) selain itu tidak adanya koordinasi pemerataan harga antar sentra yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang kurang sehat dan saling menjatuhkan.
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat menciptakan sebuah suasana lingkungan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya. Hal ini partisipasi Sentra Boneka Sukamulya yang mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Dinas Perindustrian Kota Bandung belum membuat program menyetarakan harga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar Sentra Boneka Sukamulya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mampu menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif potensi khusunya Sentra Boneka Sukamulya ini dapat terus berkembang.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa keberhasilan Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat menciptakan sebuah suasana lingkungan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya. Hal ini partisipasi Sentra Boneka Sukamulya yang mengikuti Program Standar Nasional

Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mampu menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif.

Dinas Perindustrian Kota Bandung belum membuat program menyetarakan harga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar Sentra Boneka Sukamulya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mampu menjaga dan memelihara sebuah suasana maupun iklim usaha agar tetap kondusif potensi khusunya Sentra Boneka Sukamulya ini dapat terus berkembang.

4.2.5.2 Memelihara Keselarasan

Memelihara keselarasan adalah aspek memelihara keselarasan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan pengrajin Sentra Boneka Sukamulya, dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Bandung belum terjadi sebuah keselarasan antara para Pengrajin Boneka Sukamulya. Mengingat selama ini belum adanya keselarasan mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yng mengikuti program tersebut selain itu pemberdayaan dengan memelihara keselarasan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan

antara Sentra Boneka Sukamulya untuk mengembangkan potensi Sentra Boneka Sukamulya.

Pelaksanaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) agar semua Sentra Boneka Sukamulya bisa mengikuti program tersebut diperlukan kerjasama antar Sentra Boneka Sukamulya sehingga terjadi keselarasan regulasi selain itu regulasi tentang bantuan modal agar Sentra Boneka Sukamulya semakin potensial dan akan terus dikembangkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan terus menjaga dan memelihara sebuah keselarasan maka potensi ini dapat terus berkembang.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung :

> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengadakan Program SNI tahun 2015 dan 2016 untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu sentra yang memiliki SNI karena biaya SNI yang cukup mahal karena tanpa memiliki SNI barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun global Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) jadi permasalahannya sentra Boneka Sukamulya adalah ketidak mampuan pengrajin mengikuti program tersebut karena modal selain itu lokasi sentra boneka yang kurang strategis dan program tahun 2017 belum ada jadi untuk tahun ini programnya belum berjalan.
> (12/06/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sumber Daya dan Ivenstasi Industri yang melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat menciptakan sebuah keselarasan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya. Hal ini karena Ketidak mampuan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk menyetarakan harga yang mengakibatkan persaingan pengrajin yang tidak sehat Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* Terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

Berikut hasil wawancara dengan pengrajin Boneka Sukamulya adalah :

> Memang ada program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berupa Program SNI yang di sosialisasikan ke setiap sentra tetapi harga untuk mendapatkan lebel SNI tersebut cukup mahal untuk perenam bulan harus membayar lima juta sebagai pengrajin boneka saya keberatan dengan program tersebut terlebih belum adanya bantuan modal dari dinas tersebut sehingga semakin memberatkan menghadapi persaingan sekarang maka sentra banyak yang bangkrut selain itu pemuda disekitar sentra kurang melestarikan sentra boneka yang sudah terkenal dari tahun 1990.
> (14/06/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengrajin Boneka adalah pengrajin Boneka Sukamulya ingin mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang di adakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat menciptakan sebuah keselarasan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya. Hal ini karena Ketidak mampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk menyetarakan harga yang mengakibatkan persaingan pengrajin yang tidak sehat Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global.*

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis sejauh ini bahwa keberhasilan Pemberdayaan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dapat menciptakan sebuah keselarasan yang membuat para pelaku nyaman dan kondusif untuk mengembangkan potensinya.

Ketidak mampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk menyetarakan harga yang mengakibatkan persaingan pengrajin yang tidak sehat Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Sentra Boneka Sukamulya berupa Sosialisasi setelah dilakukannya program tersebut hanya satu Sentra Boneka Sukamulya yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) karena biaya yang cukup mahal karena tanpa memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) barang tidak bisa dijual dipasar nasional maupun *global* terlebih menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).